

Dini Yuliani

Kajian Sosial Budaya KIHT (artikel).docx

Sources Overview

18%

OVERALL SIMILARITY

1	kemenperin.go.id	1%
2	journal.umi.ac.id	1%
3	docplayer.info	<1%
4	e-journal.upr.ac.id	<1%
5	www.djpk.kemenkeu.go.id	<1%
6	www.neliti.com	<1%
7	digilib.iain-jember.ac.id	<1%
8	e-journal.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
9	id.wikipedia.org	<1%
10	kabar-terhangat.blogspot.com	<1%
11	beritasatumediald.bz	<1%
12	prosiding.umi.ac.id	<1%
13	jurnal.isi-dps.ac.id	<1%
14	e-jurnal.unisda.ac.id	<1%
15	jurnal.usu.ac.id	<1%
16	www.scribd.com	<1%

17	ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id	INTERNET	<1%
18	lovelyristin.com	INTERNET	<1%
19	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
20	media.neliti.com	INTERNET	<1%
21	www.jurnal.syntaxliterate.co.id	INTERNET	<1%
22	test.wartaekonomi.co.id	INTERNET	<1%
23	eprints.uns.ac.id	INTERNET	<1%
24	repository.upi.edu	INTERNET	<1%
25	riau.harianhaluan.com	INTERNET	<1%
26	publikasi.mercubuana.ac.id	INTERNET	<1%
27	123dok.com	INTERNET	<1%
28	disperin.bone.go.id	INTERNET	<1%
29	www.kompasiana.com	INTERNET	<1%
30	Adnan H., Tadjudin D., Yuliani L., Komarudin H., Lopulalan D., Siagian Y., Munggoro D., (eds.). "Belajar dari Bungo: mengelola sumberda...	CROSSREF	<1%
31	databoks.katadata.co.id	INTERNET	<1%
32	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%
33	digilibadmin.unismuh.ac.id	INTERNET	<1%
34	guruberbagi.kemdikbud.go.id	INTERNET	<1%
35	id.scribd.com	INTERNET	<1%
36	repository.upstegal.ac.id	INTERNET	<1%
37	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
38	vdocuments.site	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

None

Excluded from document:

None

Excluded sources:

None

KAJIAN SOSIAL BUDAYA PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

H. Tatang Parjaman, H. Aan Anwar Sihabudin,
Dini Yuliani, Irfan Nursetiawan, Ii Sujai

tatang.parjaman@gmail.com

diniasyari16@gmail.com

irfan.nursetiawan@gmail.com

Abstrak

Kajian ini dilatar belakangi bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya yang salah satunya melalui pembentukan sebuah kawasan industri. Selain memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk pembentukan sebuah kawasan industri, Kabupaten Ciamis juga termasuk ke dalam kawasan percepatan pembangunan nasional wilayah pesisir selatan Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan kajian akademik untuk pembentukan kawasan industri yaitu Kawasan industri hasil tembakau. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang relevan dengan pengungkapan fenomena secara empiris yang dikorelasikan dengan landasan yuridis dan konseptis, dengan analisis data menggunakan triangulasi sehingga membentuk sebuah kajian akademik yang beretika dan normatif. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau diharapkan memberikan banyak manfaat dan keuntungan dari bidang ekonomi masyarakat, terbentuknya kelembagaan baru dalam masyarakat, serta memudahkan pemerintah daerah dalam pembinaan dan koordinasi di kawasan industri tersebut. Tetapi juga perlu diantisipasi dampak negatif, diantaranya dengan cara monitoring dan bina lingkungan yang terorganisir oleh pemerintah setempat.

Kata Kunci : *Kajian, Sosial, Budaya, Industri Kawasan Hasil Tembakau.*

LATAR BELAKANG

Keberadaan industri di Kabupaten Ciamis hingga saat ini hanya memiliki 3 sektor industri yang menopang perekonomiannya, yakni: (1) Industri pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) Industri Perdagangan Besar dan Eceran; (3) Industri Transportasi dan Pergudangan (BPS, 2020). Industri hasil tembakau termasuk pada kategori/kelompok industri yang pertama, di mana keberadaannya belum bisa dikatakan masif, karena keberadaannya baru pada tahap industri yang sifat informal. Selain ketiga sektor industri tersebut, di Kecamatan Rancah saat ini telah berjalan unit produksi hasil tembakau dengan jumlah pekerja sekitar 25-30 orang. Adapun sumber bahan baku produksi rokok di Rancah berasal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis tahun 2020, terdapat 3 wilayah kecamatan yang menjadi sentra

petani tembakau, yakni di wilayah kecamatan Pamarican, Lakbok, dan Purwadadi.

Salah satu sektor domestik penunjang kontribusi tertinggi perekonomian nasional dan juga memiliki daya saing tinggi adalah industri hasil tembakau (IHT). Kontribusi IHT cukup tinggi setelah industri makanan dan minuman, di mana posisi Indonesia adalah sebagai eksportir nomor 6 di dunia untuk produk IHT (Kementrian Perindustrian dan Perdagangan RI, 2020). Pendapatan negara dari industri hasil tembakau yang merupakan sumbangan dari kategori kearifan lokal diperoleh dari penyerapan tenaga kerja yang tinggi, cukai rokok serta dari tembakau dan cengkeh sebagai komoditas penting hasil perkebunan. Dengan posisi seperti itu, maka IHT menjadi penyumbang devisa sebesar USD 900 juta/tahun, pendapatan Negara dari cukai dan pajak setiap tahun meningkat lebih dari Rp 200 T, selanjutnya dampak terhadap serapan tenaga kerja untuk sektor manufaktur dan distribusi IHT sebanyak 4,28 juta orang serta di sektor perkebunan lebih dari 2 juta orang (BPS, 2020).

Meskipun perkembangan industri hasil tembakau menjadi satu penyumbang terbesar perekonomian, tetapi IHT ini juga memberikan dampak negatif terhadap perkembangan kesehatan masyarakat (Wijaya, 2019). Sehingga 10 persen cukai rokok, dikontribusikan untuk optimalisasi penanganan pelayanan kesehatan masyarakat oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 3,67% untuk realisasi cukai hasil tembakau dengan penerimaan negara sebesar Rp. 179,83 triliun. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan tarif cukai rokok serta pergeseran penerimaan cukai hasil tembakau dari tahun 2019 yang hanya sebesar 96,74% dari total penerimaan (Kusnandar V.B, 2021).

Tentu saja dengan kondisi faktual seperti yang telah dijelaskan di atas perlu dipertahankan bahkan terus ditingkatkan, karena terbukti IHT ini memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Industri ini juga terbukti masih bisa bertahan kendati dalam situasi krisis ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19, pelaku IHT nyaris tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan para mitra kerjanya di bisnis ini. Bila dilihat dari dimensi historis, bahwa perkembangan industri hasil tembakau (IHT) khususnya rokok kretek (komoditas tembakau dan cengkih) telah menjadi bagian sejarah bangsa dan budaya masyarakat kita yang sangat "Indonesia". Industri ini adalah sebagai warisan nenek moyang yang sudah mengakar secara turun menurun.

Potensi tumbuh dan berkembangnya IHT di Indonesia sebenarnya berada di Daerah/Desa sebagai basis sentra produksi, bahan baku, dan sekaligus juga pasar. Oleh karena itu, potensi nasional IHT yang cerah ini perlu didukung oleh sentra-sentra produksi di daerah. Pemerintah Daerah ditantang untuk merespon potensi bisnis ini menjadi bagian dari bisnis daerahnya. Daerah ditantang menjadi pemasok IHT untuk skala nasional, karena secara nasional telah memiliki visi ingin mewujudkan IHT yang kuat

9 dan berdaya saing di pasar dalam negeri dan global dengan memperhatikan bagian kesehatan. Secara nasional saat ini IHT ingin meningkatkan produksi rokok sebanyak 260 M batang rokok dan meningkatkan nilai ekspor tembakau sebesar USD 1,5 juta. Saat ini telah banyak tersebar pelaku-pelaku IHT di daerah, namun belum terkontrol dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Sehingga muncul beberapa permasalahan seperti: iklim kompetisi IHT belum sehat, maraknya produksi dan peredaran rokok ilegal, serta 9 pasokan tembakau yang tidak memenuhi kebutuhan dan kualitasnya rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Pemerintah dituntut hadir dalam persoalan praktik para pelaku usaha IHT untuk memastikan bahwa mereka bisa berkembang dengan baik dan mendapatkan perlindungan secara hukum, karena mereka ini adalah sebagai asset Negara. Upaya tersebut dibuktikan dengan lahirnya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan industri rokok dan tembakau. Kebijakan-kebijakan yang 5 berkaitan langsung dengan IHT di Indonesia, antara lain: UU Nomor 3/2014 (Tentang Perindustrian); PP No 142/2015 (Tentang Kawasan Industri); 5 PERMENPERIN No 64/2014 (Tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok); PERMENPERIN No 40/2016 (Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri); 11 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah serius untuk memfasilitasi IHT di Tanah Air. Namun permasalahannya adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam merespon keinginan Pemerintah Pusat tersebut.

Untuk merespon keinginan pemerintah pusat, maka Pemerintah Kabupaten Ciamis dituntut untuk proaktif dalam merespon dan tidak salah seandainya berkeinginan untuk membangun suatu kawasan industri yang khusus menyediakan lahan yang diperuntukkan bagi para pelaku industri hasil tembakau (IHT) di wilayah Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis memiliki potensi untuk menjadi salah satu daerah penyangga IHT yang berperan sebagai pemasok, produksi, serta pasar yang tidak jenuh dari masa ke masa.

Diperlukan beberapa kajian akademis yang komprehensif sebelum ada penetapan kawasan industri tersebut, termasuk untuk kawasan industri hasil tembakau di Kabupaten Ciamis, mengingat pembangunan suatu kawasan industri di suatu wilayah akan berdampak (positif dan negatif) pada segala aspek kehidupan masyarakat di sekitarnya: ekonomi, sosial budaya, hukum, dan yang lainnya. Dalam kajian ini Tim pengkaji akan menelaah dari dua aspek yakni sosial budaya. Aspek sosial budaya dan kawasan industri saling terkait bahkan saling mempengaruhi ketika keduanya menjalankan fungsinya masing-masing. Faktor sosial dan budaya disekitar kawasan industri ikut menentukan tumbuh kembangnya kawasan tersebut.

Persoalan pembangunan suatu kawasan industri ternyata tidak sederhana, namun cukup kompleks dan memerlukan penanganan yang serius. Adapun beberapa persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, karena IHT ini adalah komoditi yang berbasis ekspor, maka ada tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk bisa mengambil peran dalam industri hasil tembakau (IHT) di Kabupaten Ciamis. *Kedua*, bagaimana kesiapan/antusiasme atau tanggapan para pelaku IHT di Kabupaten Ciamis seandainya Pemerintah membangun kawasan khusus industri hasil tembakau. *Ketiga*, bagaimanakah kemungkinan perubahan sosial budaya atas rencana pembangunan KIHT di wilayah kabupaten Ciamis.

Adapun tujuan dari penyusunan kajian akademik ini sebagai berikut: *pertama*, sebagai acuan dan pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang ideal dan menjadi dasar dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan industri hasil tembakau (IHT). *Kedua*, untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembangunan kawasan industri hasil tembakau di Kabupaten Ciamis.

METODE PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIK

Metode kajian yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hal ini tentunya disesuaikan dengan aspek sosial budaya yang menjadi titik tumpu dalam kajian yang akan dilakukan. Metode kualitatif ini relevan dengan pengungkapan fenomena secara empiris yang dikorelasikan dengan landasan yuridis dan konseptis, serta membentuk sebuah penelitian yang beretika dan normatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari informan dengan alat pengumpul data yang berasal dari hasil wawancara. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dalam permasalahan yang diteliti, yaitu bersumber dari profil Kabupaten Ciamis dan dokumen yang terkait dengan pendirian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Selain itu, jenis sumber data yang dianalisis dalam hal ini merupakan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari informan yang secara *random sampling* berada di wilayah lokus kajian analisis. Adapun untuk teknik analisis data yang digunakan dalam hal ini, yakni analisis sosial ekonomi masyarakat dan analisis demografi (kepadatan penduduk). Dalam hal ini menggunakan analisis deskriptif, yakni mendeskripsikan data yang dianalisis menjadi informasi sebagai interpretasi dari data yang telah dikumpulkan, dan akhirnya dihasilkan suatu kesimpulan, serta rekomendasi dari aspek sosial budaya secara menyeluruh. Informan diambil secara *purposive sampling* (sampel bertujuan) dan hal itu dilatarbelakangi oleh cakupan kewilayahan objek kajian yang sangat luas. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang terkumpul secara signifikan. Triangulasi data menjadi patokan baku dalam penelitian ini untuk menghasilkan validitas data yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan berkorelasi dengan konsep atau teori yang dipakai.

PEMBAHASAN HASIL KAJIAN

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi yang sangat besar yang akan menyokong perekonomian Kabupaten Ciamis dimasa yang akan datang. Bila merujuk pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi, serta Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Ciamis, maka di Kabupaten Ciamis memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk pengembangan industri hasil tembakau serta potensi sumber daya manusia angkatan kerja juga tersedia. Di Kabupaten Ciamis saat ini telah berkembang industri kreatif yang berbasis pertanian, seperti: Galendo Ciamis, kripik pisang, yang telah menjadi “icon” nya Ciamis. Untuk sektor industri hasil hutan pun saat ini embrionya telah ada di Kecamatan Rancah, dan bila dibina serta dikembangkan tidak menutup kemungkinan industri ini pun bisa berkembang di Kabupaten Ciamis.

Dengan demikian, sebenarnya pionir IHT di Ciamis telah eksis dan memiliki prospek baik, terbukti pada saat diguncang wabah covid-19 pun masih bisa bertahan. Tidak menjadi masalah walaupun saat ini bahan baku IHT di Rancah masih disuplai dari wilayah di luar Ciamis, yang penting produksi berada di Ciamis dan pelakunya melibatkan masyarakat Ciamis. Pembinaan IHT yang ada dari Dinas terkait tentu telah dilakukan walaupun belum optimal. Ketika ada wacana di Kabupaten Ciamis akan dibentuk Kawasan Industri Hasil Tembakau yang tentunya akan menunjang industri pertaniannya, maka ini adalah gagasan yang tepat. Secara ekonomi dan kesempatan kerja sangat prospektif, sehingga pada ujungnya KIHT di Kabupaten Ciamis akan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Secara sosial budaya industri hasil tembakau telah “ada”/eksis, dan persoalan tembakau ini merupakan warisan nenek moyang kita sejak dulu yang sangat “Indonesia”. Ditunjang dengan fakta bahwa bahwa IHT secara nasional telah berkontribusi pada pendapatan nasional kita. Oleh karena itu kabupaten Ciamis seyogianya ikut “bermain” dan menjadi bagian dari bisnis IHT nasional di daerah. Pembangunan KIHT menjadi salah satu alternatif untuk menambah pendapatan daerah di Ciamis.

Berdasarkan hasil analisis potensi ekonomi di Kabupaten Ciamis yang dikemukakan oleh Tim Kajian Ekonomi KIHT dari FE Unigal (2021) bahwa ada beberapa potensi kuat yang mengarahkan layak dibentuknya KIHT di Ciamis, yakni: *Pertama*, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan komoditas unggulan dan kontributor terbesar PDRB Kabupaten Ciamis; *Kedua*, ketersediaan bahan baku utama IHT di Ciamis (tembakau dan cengkeh) menjadi basis tanaman perkebunan yang akan digalakkan; *Ketiga*, kesiapan sumber daya manusia sebagai angkatan kerja di Ciamis dari berbagai tingkatan pendidikan memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam bisnis IHT; *Keempat*, potensi pasar IHT sangat terbuka.

Dengan adanya potensi yang sangat prospektif tersebut, maka diperlukan kesiapan Daerah untuk menangkap peluang ini secepatnya. Industri hasil tembakau (IHT) ini adalah bisnisnya daerah, peluang besar

untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dari sektor pertanian sudah terlihat di muka. Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai *leading* sektor pembangunan di kabupaten Ciamis dituntut untuk cepat, kreatif, dan inovatif untuk mewujudkan KIHT di wilayahnya, karena bila terwujud akan meningkatkan daya saing daerah.

Dilihat dari aspek sosial budaya dalam pembentukan KIHT di Ciamis, Tim kajian mendorong bahwa aspek sosial dan budaya itu sebenarnya ada di dua tataran, yakni tataran mikro (Pemerintah) dan ada di tataran makro (Masyarakat). Pada tataran mikro/Pemerintah, aspek-aspek sosial budaya adalah berupa isu-isu yang sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dilakukan demi terwujudnya KIHT. Isu-isu sosial budaya tersebut adalah berupa: pengembangan kelembagaan, *networking*, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan lingkungan yang kondusif (Hughes, 1998).

Pengembangan kelembagaan.

Di era otonomi daerah saat ini tugas Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengembangkan semua kelembagaan di daerah: lembaga pendidikan, keagamaan, ormas, yayasan, ekonomi, dan lembaga lainnya. Lembaga-lembaga tersebut bila berkembang akan membantu pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Saat ini upaya Pemda Ciamis kearah itu telah dilakukan melalui Dinas-Dinas terkait. Misalnya upaya pengembangan BUMDes, lembaga-lembaga keagamaan, dan lainnya, sehingga hasil bisa terlihat bahwa kondisi sosial budaya di Ciamis begitu kondusif. Dalam konteks pembentukan KIHT, tentu peran Pemda dalam pengembangan kelembagaan tersebut akan lebih terkonsentrasi pada berbagai kelembagaan di sekitar KIHT. Misalnya bagaimana BUMDes disekitar KIHT bisa mengambil bagian dalam industri ini. Apakah BUMDes bisa menjadi pemain atau hanya sebagai penonton? Dalam hal ini Camat dan Kepala Desa dituntut perannya untuk lebih proaktif agar BUMDes tidak hanya menjadi penonton. Usahakan bisa menjadi pemain IHT dari sisi mana saja yang memungkinkan.

Networking.

Dalam konteks KIHT, Pemda dituntut memiliki jejaring (*network*) dengan semua pihak: Pemerintah Pusat/Pemda yang lain, Dunia Usaha (Bisnis), Masyarakat, Akademisi, Media Massa, karena membangun KIHT memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan pihak-pihak tersebut. Selama ini kolaborasi sudah terjadi terutama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat, Kantor Bea Cukai Tasikmalaya, DPRD setempat, Perguruan Tinggi, dalam rangka persiapan pembentukan KIHT. Kerjasama dengan pihak lain terutama dengan dunia usaha perlu diusahakan semaksimal mungkin. Terutama bagaimana caranya Pemda memikirkan inovasi pembiayaan untuk pembangunan kawasan IHT. Skema yang bisa ditempuh salah satunya adalah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau saat dikenal *Public Privat Partnership*. Cara ini telah banyak dilakukan

oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda yang lain di Indonesia, misalnya dalam upaya pengembangan pariwisata. Pihak dunia usaha (dalam dan luar negeri) dengan telah diberlakukannya UU Cipta Kerja di Indonesia sebenarnya banyak yang berminat berinvestasi di Indonesia.

Networking merupakan upaya untuk melakukan kolaborasi antar pihak yang berkepentingan dan ini merupakan “budaya baru” dalam era manajemen publik saat ini. Strategi Pemda yang lalu seperti strategi “jalan sendiri”, saat ini perlu diubah dengan strategi kolaborasi. Pendekatan kepada dunia usaha perlu dilakukan karena mereka adalah memiliki sumber daya finansial dan siap menyediakan kesempatan kerja. Sedangkan Pemda berfungsi untuk menyiapkan regulasinya serta menjaga kondusifitas lingkungannya, sehingga para investor mau berinvestasi dalam KIHT di Ciamis.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia (makro/mikro) dalam pembangunan KIHT di Kabupaten Ciamis harus menjadi prioritas utama, karena tanpa sumber daya manusia yang kompeten tidak akan memiliki daya saing yang tangguh. Pengembangan sdm mikro diarahkan pada penguatan kompetensi aparatur birokrasi di Pemerintah Daerah. Dengan maksud terutama kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam pengembangan KIHT. Sedangkan pengembangan sdm di level makro adalah berupaya membentuk kompetensi para pelaku usaha IHT termasuk calon tenaga kerja di sektor produksi, pemasaran, maupun di sektor perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan dalam IHT. Bentuk pengembangan sumber daya manusia (makro/mikro) bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti diklat, pendampingan, sosialisasi, magang, dan lain-lain.

Pengembangan Lingkungan Yang Kondusif

Di beberapa daerah yang memiliki kawasan industri, sering melakukan kegiatan “Bina Lingkungan” di sekitar kawasan itu. Kegiatan ini bisa dilakukan secara kolaboratif antara Pemda, masyarakat, dunia usaha, atau pihak lain. Dalam hal ini tentu saja inisiatornya dimulai dari Pemerintah, karena tugas pemerintah dalam hal ini adalah membangun lingkungan yg kondusif. Para pelaku usaha akan merasa nyaman bila tidak terganggu oleh hal-hal yang non teknis yang merugikan usahanya. Dalam rangka mewujudkan governansi kawasan IHT perlu dibangun komunikasi yang intensif diantara stakeholders KIHT yang akan dibangun di Kabupaten Ciamis.

Tantangan sosial budaya ditataran makro (masyarakat) yang perlu diantisipasi adalah terdapat beberapa aspek yang kemungkinan akan terjadi perubahan secara sosial budaya masyarakat di sekitar KIHT, yakni:

- a) Ada kemungkinan jumlah penduduk menjadi bertambah yang berasal dari pendatang yang bisa saja merubah kondisi sosial budaya yang telah ada;

- b) Lingkungan sekitar KIHT akan memunculkan jenis mata pencaharian baru selain yang telah ada sebelumnya;
- c) Perubahan interaksi sosial dan semangat kebersamaan disekitar KIHT;
- d) Hilangnya tradisi/adat istiadat karena terkalahkan budaya baru dari pendatang;
- e) Meningkatnya kegiatan keagamaan yg berasal dari pendatang yang rajin melakukan syiar-syiar keagamaan;
- f) Berkembangnya teknologi modern di lingkungan masyarakat sekitar KIHT.

Potensi-potensi perubahan sosial budaya tersebut bisa diantisipasi dengan cara monitoring, bina lingkungan, dari semua pihak terutama pihak otoritas KIHT yang dituntut untuk bisa saling beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru di kawasan itu.

Dengan dibentuknya KIHT di Kabupaten Ciamis akan memiliki banyak manfaat dan keuntungan, antara lain: (1) Memudahkan Pemerintah dalam pembinaan pada pelaku IHT; (2) sebagai upaya preventif untuk mengendalikan produk-produk IHT ilegal; (3) merangsang IKM-IKM yang ada termasuk BUMDes untuk bisa bergabung/berkolaborasi dalam usaha IHT; (4) merangsang masyarakat untuk siap menjadi sumber pemasok bahan baku, dan lainnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kajian akademik dalam pembentukan suatu kawasan sangat penting dilaksanakan, salah satunya adalah dalam bidang kajian sosial budaya masyarakatnya. Kabupaten Ciamis dengan segala potensi yang dimilikinya dan untuk menjawab tantangan pusat dalam percepatan pembangunan nasional, menangkap peluang tersebut dengan mempersiapkan pembentukan kawasan industri hasil tembakau di wilayah Kabupaten Ciamis. Aspek sosial budaya dalam pembentukan kawasan industri hasil tembakau terdapat dalam tataran mikro yaitu pemerintah dan tataran makro atau tataran masyarakat. Isu sosial budaya tersebut dalam bidang pengembangan kelembagaan dalam masyarakat di kawasan industri, memiliki jejaring dengan berbagai pihak yang berkepentingan, perlu pengembangan sumber daya manusia yang kompeten sehingga memiliki daya saing yang tangguh, serta pengembangan lingkungan yang kondusif yang dilakukan secara kolaboratif antar pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan pihak yang berkepentingan.

Rekomendasi

Setelah mengkaji dari pertimbangan aspek sosial budaya dalam pembentukan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) di Kabupaten Ciamis, maka berikut ini rekomendasi dalam pembentukan kawasan industri hasil tembakau di Kabupaten Ciamis:

- a) Secara sosial budaya KIHT perlu diwujudkan di kabupaten Ciamis, karena akan menguntungkan semua pihak: pemerintah daerah, pelaku usaha IHT, masyarakat angkatan kerja;
- b) Dalam konteks KIHT, tantangan sosial budaya di level pemerintah, seyogianya melakukan: (a) pengembangan kelembagaan-lembagaan di sekitar KIHT, (b) networking, (c) pengembangan sumber daya manusia (makro dan mikro), (d) menciptakan lingkungan yang kondusif di sekitar KIHT.
- c) Perlu diantisipasi kemungkinan adanya perubahan sosial budaya pada level makro (masyarakat) sekitar KHIT seperti: penambahan jumlah penduduk, bertambahnya jenis mata pencaharian, berubahnya cara interaksi masyarakat, terkikisnya budaya setempat, dll.
- d) Sebagai antisipasi untuk nomor c) tersebut, maka Pemda dan Otoritas KIHT perlu melakukan “Bina Lingkungan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyanti, L. D. (2018). Strategi Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau Di Kabupaten Ponorogo. *AGRORADIX: Jurnal Ilmu Pertanian*, 1(2), 42-51.
- Dirgapraja, V. A., Poluan, R. J., & Lakat, R. S. (2019). Pengaruh Pengembangan Kawasan Industri Terhadap Permukiman Kecamatan Madidir Kota Bitung. *SPASIAL*, 6(2), 282-290.
- Giddens, Anthony. (1991) *Social Theory Today (Terjemahan)*. Pustaka Pelajar Press, Yogyakarta.
- Homer, E. N., Wicaksono, A. D., & Usman, F. (2016). Penentuan Jenis Klaster industri di Kawasan Industri Arar Kabupaten Sorong Berdasarkan Metode Delphi dan Analytical Hierarchi Process (AHP). *The Indonesian Green Technology Journal*, 5(1), 16-23.
- Herimanto dan Winarno (2014). Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hughes, Owen E. (1998). *Public Management & Administration*. Palgrave Publisher Ltd. New York.
- Kistanto, N. H. (2008). Sistem Sosial-Budaya di Indonesia. *Sabda: jurnal kajian kebudayaan*, 3(2).
- Kusnandar V.B (2021). Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau. Tersedia: (Online)
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/06/realisasi-penerimaan-cukai-hasil-tembakau-naik-367-pada-2020>. Diunduh: 01 Oktober 2021.
- Lexy J. Moleong (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
- Mepriyanto, N. D., & Saptutyningsih, E. (2019). Pengaruh Keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT) Terhadap Harga Rumah Menggunakan Pendekatan Hedonic Price: Studi Pada Kawasan Sekitar PR Sukun, Kudus, Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 3(2), 72-82.
- Murti, I. A. (2011). Analisis Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Surakarta.
- Pebriani, N. K. D., Erviantono, T., & Wismayanti, K. W. D. (2017). Kemitraan pengembangan sektor pariwisata (Studi Kasus: Bali Elephant Camp, Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung). *Citizen Charter*, 1(1), 165251.
- Purbasari, I. (2018). Dinamika Pembangunan Masyarakat Kudus Berkonteks Sejarah Industri dan Budaya Lokal. *Khazanah Pendidikan*, 11(1).
- Rachmat, M., & Aldillah, R. (2010). Agribisnis tembakau di Indonesia: Kontroversi dan prospek. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 28, No. 1, pp. 69-80).
- Verulitasari, E., & Cahyono, A. (2016). Nilai Budaya Dalam Pertunjukan Rapai Geleng Mencerminkan Identitas Budaya Aceh. *Catharsis*, 5(1), 41-47.
- Wijaya, C. (2019). Analisis Hukum Penolakan Akses Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Terhadap Industri Hasil Tembakau di Indonesia.

⁸Yoga, S. (2019). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 24(1).